

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kabupaten Demak)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

BAHTERA AFRIKANI SRI WURI HANDAYANI
NIM. 12030114140222

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114140222
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kabupaten Demak)
Dosen Pembimbing : Dul Mu id, S.E.,M.Si.,Akt.

Semarang, 31 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

Dul Mu id, S.E.,M.Si.,Akt.

NIP. 19650513 199403 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama penyusun : Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114140222
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak
Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kabupaten Demak)

Telah dinyatakan lulus pada tanggal

Tim Penguji :

1. Dul Mu id, S.E.,M.Si.,Akt. (.....)
2. Fuad, SET.,M.Si.,Ph.D. (.....)
3. Adi Firman Ramadhann, S.E.,M.Ak.,Ak.,C.A. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Demak)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini, Bila dikemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Bahtera Afrikani Sri Wuri Handayani
NIM. 12030114140222

ABSTRACT

This study is concerned with the occurrence of tax evasion by tax actors who then direct this study to develop an empirical model of tax evasion measures described by the variables of tax understanding, perception of justice, taxation system as independent variables, taxpayer compliance as the mediating and religiosity variables taxpayer as a moderating variable.

Data related variables studied were obtained through interviews to taxpayers of individuals who pay taxes late or not pay taxes in the Tax Office (KPP) Pratama Demak by using questionnaires. The data obtained then analyzed using Multiple Regression analysis approach.

Empirical testing conducted in this study yielded five conclusions, namely the understanding of taxation is a variable that can significantly explain the occurrence of changes in taxpayer compliance, perception of justice is a variable that can significantly explain the occurrence of changes in taxpayer compliance, taxation system is a variable that real is able to explain the occurrence of changes in taxpayer compliance, taxpayer compliance is a variable that can explicitly explain the occurrence of tax evasion by taxpayers, and taxpayer religiosity is not proven to moderate the influence of taxpayer compliance with tax evasion.

Keywords: understanding of taxation, perception of justice, system of taxation, taxpayer compliance, taxpayer religiosity, tax evasion action

ABSTRAK

Studi ini memasalahkan mengenai terjadinya tindakan penggelapan pajak oleh pelaku pajak yang kemudian mengarahkan studi ini untuk mengembangkan sebuah model empiris mengenai tindakan penggelapan pajak yang dijelaskan oleh variabel pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, sistem perpajakan sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi, variabel religiusitas wajib pajak sebagai variabel pemoderasi dan variabel tindakan penggelapan pajak sebagai variabel terikat.

Data-data terkait variabel yang diteliti diperoleh melalui wawancara kepada wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak terlambat atau tidak membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak dengan menggunakan kuesioner. Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis Regresi Berganda.

Pengujian empiris yang dilakukan pada studi ini menghasilkan lima kesimpulan, yaitu pemahaman perpajakan merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya perubahan pada kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya perubahan pada kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya perubahan pada kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan variabel yang secara nyata mampu menjelaskan terjadinya tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak, dan religiusitas wajib pajak tidak terbukti memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

Kata Kunci: pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak, religiusitas wajib pajak, tindakan penggelapan pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Demak)” dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak terlepas dari peran berbagai pihak, itulah sebabnya, dalam dan melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Ibu terkasih yang telah memberikan doa yang tiada henti, dukungan yang tiada terkira kepada penulis, serta kesedian untuk berkorban waktu yang telah tersita selama proses studi.
2. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Bapak Fuad, M.Si.,Ph.D. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Bapak Dul Mu id, S.E.,M.Si.,Akt. selaku Pembimbing yang selama proses penyusunan Skripsi ini telah memberikan komentar, saran, kritik dan koreksi dengan penuh perhatian sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa itu semua membutuhkan pengorbanan baik dalam tenaga, waktu maupun pikiran.
5. Ibu Etna Nur Afri Yuyetta, Dr, SE, M.Si, Akt selaku dosen wali yang telah memberikan banyak nasihat serta arahan kepada penulis selama menempuh studi ini.
6. Kepada semua Staf Pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan tambahan bekal ilmu dan fasilitas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Kepada Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk memperbaiki kualitas Skripsi ini.

8. Kepada Bapak Dwi Joko Kristanto, S.E., M.M., M.Si selaku pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Demak yang memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Demak sebagai responden penelitian yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini dengan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk lebih menyempurnakannya.

Akhir kata, terbetik harapan bahwa sesuatu yang kecil ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, 31 Januari 2019

Penulis,

Bahtera Afrikani
NIM. 12030114140222

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Belajarlah dari air. Dari celah dan retakan gunung, menderu deras dari kawah uap namun mengalir dengan tenang di sungai.

Sesuatu yang kosong berbunyi nyaring, Sesuatu yang penuh tidak berbunyi. Yang bodoh seperti tempayan yang berisi separuh, Yang bijaksana seperti kolam dalam yang tenang.” [Sutta Nipata: 720-721]

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Almarhum Ayah, Ibu, Adik & keluarga besarku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN	9
2.1 Telaah Pustaka	9
2.1.1 Penggelapan Pajak	9
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.3 Pemahaman Perpajakan	11

2.1.4	Persepsi Keadilan	12
2.1.5	Sistem Perpajakan	13
2.1.6	Religiusitas	14
2.1.7	Theory of Planned Behaviour	14
2.2	Pengembangan Hipotesis Penelitian	
2.2.1	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.2.2	Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.2.3	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.2.4	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.....	19
2.2.5	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Religiusitas	20
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu	21
2.4	Kerangka Pemikiran	22
 BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Jenis Penelitian	23
3.2	Populasi dan Sampel	24
3.3	Jenis dan Sumber Data	25
3.4	Metode Pengumpulan Data	26
3.5	Pengembangan Indikator Variabel Penelitian	
3.5.1	Indikator Variabel Pemahaman Perpajakan	27
3.5.2	Indikator Variabel Persepsi Keadilan	27
3.5.3	Indikator Variabel Sistem Perpajakan	28
3.5.4	Indikator Variabel Religiusitas	28
3.5.5	Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	29
3.5.6	Indikator Variabel Tindakan Penggelapan Pajak	29
3.6	Teknik Analisis	
3.6.1	Analisis Deskriptif	30
3.6.2	Uji Kualitas Data	30
3.6.3	Uji Normalitas	31
3.6.4	Uji Asumsi Klasik	31
3.6.5	Persamaan Regresi Berganda	32
3.6.6	Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)	32
3.6.7	Koefisien Determinasi	33
3.6.8	Uji Kelayakan Model	33

BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Analisis Deskriptif	34
4.1.1 Variabel Pemahaman Perpajakan	35
4.1.2 Variabel Persepsi Keadilan	36
4.1.3 Variabel Sistem Perpajakan	37
4.1.4 Variabel Religiusitas	38
4.1.5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	39
4.1.6 Variabel Tindakan Penggelapan Pajak	40
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	42
4.2.1 Uji Validitas	43
4.2.2 Uji Reliabilitas	45
4.3 Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1 Uji Normalitas	47
4.3.2 Uji Multikolinieritas	48
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	49
4.4 Uji Regresi Berganda	50
4.4.1 Uji t	51
4.4.2 Uji F	52
4.4.3 Koefisien Determinasi	53
4.5 Pengujian Pengaruh Pemoderasi	54
4.6 Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2017 (dalam triliun)	
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1	Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan	35
Tabel 4.2	Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Keadilan	36
Tabel 4.3	Analisis Deskriptif Variabel Sistem Perpajakan	37
Tabel 4.4	Analisis Deskriptif Variabel Religiusitas	38
Tabel 4.5	Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	39
Tabel 4.6	Analisis Deskriptif Variabel Tindakan Penggelapan Pajak	40
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Indikator pada Variabel Penelitian	43
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinieritas	48
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas	49
Tabel 4.12	Hasil Uji t pada Pengaruh antar Variabel	51
Tabel 4.13	Tabel Uji F	53
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.15	Pengujian Pengaruh Pemoderasi	55
Tabel 4.16	Pengujian Kelayakan Model pada Pengaruh Pemoderasi	58
Tabel 4.17	Koefisien Determinasi pada Pengaruh Pemoderasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	18
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1	Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan	35
Tabel 4.2	Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Keadilan	36
Tabel 4.3	Analisis Deskriptif Variabel Sistem Perpajakan	37
Tabel 4.4	Analisis Deskriptif Variabel Religiusitas	38
Tabel 4.5	Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	39
Tabel 4.6	Analisis Deskriptif Variabel Tindakan Penggelapan Pajak	40
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Indikator pada Variabel Penelitian	43
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinieritas	48
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas	49
Tabel 4.12	Hasil Uji t pada Pengaruh antar Variabel	51
Tabel 4.13	Tabel Uji F	53
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.15	Pengujian Pengaruh Pemoderasi	55
Tabel 4.16	Pengujian Kelayakan Model pada Pengaruh Pemoderasi	58
Tabel 4.17	Koefisien Determinasi pada Pengaruh Pemoderasi	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara. Pemerintah Negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan danayang cukup besar guna mewujudkannya. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber pembiayaan realisasi pembangunan nasional yang telah direncanakan. Terdapat dua sumber APBN, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Berikut ini komposisi penerimaan pajak dan bukan pajak yang menjadi sumber pendanaan APBN 2017.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2017
(dalam triliun)

Sumber	Jumlah
Penerimaan Perpajakan	1.748,9
Penerimaan Negara bukan Pajak	250,0

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, penerimaan perpajakan merupakan sumber terbesar penerimaan APBN. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya

memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/atau ekstensifikasi (Arum, 2012). Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjangkau para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dimaknai sebagai kewajiban rakyat untuk membayar iuran kepada kas Negara untuk pembiayaan umum Negara menurut peraturan yang telah diatur yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa langsung (Soemitro, 1992). Merujuk pada pengertian tersebut, terdapat dua kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Wajib pajak selaku pembayar pajak tentunya mengharapkan agar jumlah pajak yang dibayarkan kecil. Di sisi lain, pemerintah tidak wajib untuk memberikan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak dan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara. Kondisi ini menimbulkan tarik ulur kepentingan terlebih pada wajib pajak yang menjadi obyek yang dikenai pajak. Oleh karena wajib pajak menjadi obyek yang dikenai pajak (membayar pajak), maka wajib pajak akan berusaha agar jumlah pajak yang dibayarkan kecil atau jika memungkinkan, wajib pajak akan melakukan penggelapan atau bahkan penghindaran pajak (Rahman, 2013). Terkuaknya peristiwa Gayus Tambunan

dalam tindakan penggelapan pajak sejatinya merupakan fenomena gunung es mengenai terjadinya kasus-kasus penggelapan pajak yang dapat dikuak oleh pihak berwenang (Ardi, Trimurti, Suhendro, 2016).

Di Indonesia, kasus penggepalan pajak masih menjadi masalah yang serius. Meskipun selama ini kasus maupun data mengenai penggelapan pajak sulit diakses. Namun “diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghidaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan” (<http://www.suara.com> diakses 22 April 2018).

Namun, hal ini tentunya tidak akan terjadi bila wajib pajak telah memiliki kepatuhan terhadap sistem perpajakan. Studi mengenai perilaku menggelapkan pajak dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak yang ditemukan pada studi Fatimah dan Wardani (2017). Dimana pada studi tersebut dapat ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat menjelaskan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et.al. (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tepat waktu melaporkan SPT, tidak menunggak membayar pajak, dll.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan.

Ardi, Trimurti, Suhendro (2016) dalam studinya mengkaji secara empiris mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Temuan yang diperoleh adalah bahwa tindakan penggelapan pajak dijelaskan secara signifikan positif oleh persepsi pemahaman perpajakan.

Mengingat pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar maka masyarakat seyogyanya mendapat manfaat dari penggunaan pajak secara adil untuk mendapatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keadilan perlu diciptakan mengingat saat ini, keadilan akan pemanfaatan hasil pajak untuk pembangunan masih dinikmati oleh segelintir orang (Ardi, Trimurti dan Suhendro, 2016). Kondisi tersebut akhirnya menggiring wajib pajak ke dalam tindakan penggelapan pajak. Oleh karenanya persepsi keadilan oleh masyarakat memegang peran penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Fenomena tersebut kemudian oleh Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) dikaji secara ilmiah dengan menguji pengaruh persepsi keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak. Studi tersebut menunjukkan hasil yang mengejutkan dimana persepsi keadilan ternyata bukanlah peubah yang menjelaskan terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Berpijak pada fenomena penggelapan pajak yang terjadi maka untuk meminimalisirnya menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) diperlukan adanya sistem pajak. Saat ini Indonesia menggunakan self assessment sebagai sistem pajak. Pada sistem tersebut, wajib pajak dituntut peran aktifnya. Berawal dari pendaftaran diri sendiri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan kemudian melaporkannya. Fiskus pada sistem ini hanya pengawas. Masih menurut Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) bahwa kondisi ini tentunya memperlebar peluang terjadinya ketidakpatuhan oleh wajib pajak. Akibatnya, tentu dapat ditebak, yaitu lalai/tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak yang dibayarkan atau yang umum disebut dengan penggelapan pajak.

Perilaku penggelapan pajak yang berpeluang besar dalam merugikan negara, telah mendorong penelitian-penelitian untuk mengeksplorasi nilai-nilai internal yang dapat memperkuat wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Studi Pope dan Mohdali (2010) dan Mohdali dan Pope (2014) menemukan variabel religiusitas sebagai nilai internal yang dapat memperkuat pengaruh kepatuhan dalam menjelaskan perilaku penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti diketahui, pajak merupakan tiang dari penerimaan Negara. Bila pajak ditiadakan atau dihilangkan, maka penerimaan pajak Negara juga akan berkurang. Penerimaan Negara berkurang bukan hanya karena pajaknya

dihilangkan, tetapi juga karena pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi juga dapat mengurangi penerimaan pajak.

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan. Untuk itu, banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee (2004) mengenai studi penggelapan pajak di Armenia, menemukan bahwa terdapat dua alasan utama untuk menghindari pajak yaitu kurangnya mekanisme di tempat pengumpulan pajak dan pandangan masyarakat bahwa pemerintah tidak layak mengambil pendapatan dari para pekerja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian mengarahkan studi ini pada variabel-variabel yang dipilih untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Pertanyaan penelitian pada studi ini meliputi:

1. Bagaimana pemahaman perpajakan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Bagaimana persepsi keadilan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Bagaimana sistem perpajakan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Bagaimana ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak menjelaskan tindakan penggelapan pajak?

5. Bagaimana religiusitas memoderasi tindakan penggelapan pajak yang mempengaruhi oleh ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian adalah untuk melakukan:

1. Analisis kemampuan pemahaman perpajakan dalam menjelaskan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Analisis kemampuan persepsi keadilan dalam menjelaskan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak
3. Analisis kemampuan sistem perpajakan dalam menjelaskan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak
4. Analisis kemampuan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dalam menjelaskan tindakan penggelapan pajak
5. Analisis kemampuan religiusitas dalam memoderasi tindakan penggelapan pajak yang dijelaskan oleh ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan intreprastasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.